

# HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN SAYYID QUTUB

Sarif

Fakultas Ushuluddin, Adab, Dakwah IAIN Bengkulu  
Jl. Raden Fatah, Kel. Pagar Dewa, Kota Bengkulu 61544  
Email: sarif@gmail.com

**Abstract: Religion Andstaterelations In The Perspectiveof Sayyid Qutb.** This paper discusses the main points of Sayyid Qutb thought of religion as the foundations of the state and his thoughts about the relationship between religion and state. This type of research is library researchby using literature as the primary data in the research, and studies are presented in descriptive analysis. The method used in this study is a qualitative approach to history. From the results of this study found that, according to Sayyid Qutb, religion must be the basis for the formation of a government. For Sayyid Qutb, to obtain the title of an Islamic government, a community or a country should be run in accordance to the rules and the laws of God. Furthermore, Sayyid Qutb mentioned three aspects that can be classified as the principles of the Islamic government, namely justice authorities, the obedience of the people, and deliberations between the authorities and the people. Sayyid Qutb also recommended that a political power in the state must be in accordance with religious teachings, because the religion and state have interlocking relationships.

**Keywords: religion, country, Sayyid Qutb, Islamic government**

**Abstrak: Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sayyid Qutub.** Artikel ini membahas pokok-pokok pemikiran Sayyid Qutub tentang agama sebagai dasar negara dan pemikirannya tentang hubungan agama dengan negara. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai bahan utama penelitian, dan kajian disajikan secara deskriptif analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sejarah. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa menurut Sayyid Quthb, agama harus menjadi dasar bagi terbentuknya suatu pemerintahan. Bagi Sayyid Quthb, untuk memperoleh predikat pemerintahan Islam, sebuah masyarakat atau negara harus dijalankan atas peraturan, hukum dan undang-undang Tuhan. Selanjutnya, Sayyid Quthb menyebut tiga aspek yang dapat digolongkan sebagai azas-azas pemerintahan Islam, yaitu keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat. Adapun hubungan antara agama dan negara, Sayyid Quthb menganjurkan agar sebuah kekuasaan politik dalam bernegara harus bernafaskan ajaran agama. Sebab antara agama dan negara memiliki hubungan yang saling terkait.

**Kata kunci: agama, negara, Sayyid Qutub, pemerintahan Islam**

## Pendahuluan

Agama, baik samawi maupun agama ardi dan semua sistem kepercayaan lainnya, selalu mengasumsikan kemutlakan (doktrin) di samping metode yang tertuang dalam sistem ajaran, ritual dan tuntunnya. Dalam kemutlakannya itu, suatu agama berfungsi sebagai pegangan dan tuntunan hidup yang memerlukan kadar kepastian yang tinggi, dan memberi kepastian itulah fungsi pegangan atau tuntunan.<sup>1</sup>

Secara teologis, Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiah dan karena itu bersifat transenden. Tetapi, secara sosiologis, merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia Islam dalam realitas sosial tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat menzaman dan menjagatraya (universal), tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.<sup>2</sup>

Agama dikenal dengan istilah lain din dari bahasa arab, religi dari bahasa eropa dan agama sendiri dikenal dari bahasa sangsekerta. Satu pendapat mengatakan bahwa kata itu tersusun dari dua kata, a= tidak dan gama=pergi, jadi tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi turun temurun. Ada juga yang mengartikan agama berasal dari bahasa sangsekerta, yang berasal dari akar kata gam artinya pergi, kemudian dari kata gam tersebut mendapat awalan a dan akhiran a, maka terbentuklah kata agama artinya jalan. Maksudnya, jalan mencapai kebahagiaan. Disisi lain pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa gama berarti tuntunan. Memang agama mengandung ajaran-ajaran yang menjadi tuntunan hidup bagi penganutnya.<sup>3</sup>

Din dalam bahasa semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa arab kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan.<sup>4</sup>

Menurut Hendro Puspito, agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-

penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya yang didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya.<sup>5</sup>

Dalam kamus sosiologi, pengertian agama ada tiga macam yaitu;

1. Kepercayaan pada hal-hal yang spiritual
2. Perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri
3. Ideology mengenai hal-hal yang bersifat supranatural,

Sedangkan Thomas F.O'Deamengatakan bahwa agama adalah pendayagunaan sarana-sarana supra-empiris untuk maksud-maksud non empiris atau supra empiris.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi dari sudut pandang sosiologi di atas, jelas tergambar bahwa agama merupakan suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya ketika terjadi hal-hal yang berada di luar jangkauan dan kemampuannya karena sifatnya yang supra-natural sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang non-empiris.<sup>7</sup>

Sedangkan kalau kita lihat dari segi filsafati agama adalah suatu keyakinan tentang adanya realitas lain selain realitas ini. Sedangkan menurut M. Iqbal seorang filosof berpendapat bahwa hakikat agama adalah keimanan. Pendekatan M. Iqbal dalam mendefinisikan agama tidak hanya berdasarkan struktur intelektual dan struktur etik agama, agama didefinisikan dari segi ajarannya dan implikasi-implikasi ajaran itu terhadap kehidupan manusia. Dilihat dari ajarannya agama adalah sistem kebenaran umum yang mempunyai akibat mengubah perangai manusia jika dipegang teguh dan dilaksanakan dengan sukarela. Agama tidak difahami semata-mata dalam tatanan normatif, tetapi juga dalam tatanan praktis fungsional. Agama dalam tatanan normatif mempunyai nilai kognitif. Agama memberikan pengetahuan tentang norma-norma sebagai suatu kebenaran. Norma-norma yang diyakini sebagai suatu kebenaran itu, dalam tatanan praktis, mempunyai implikasi

<sup>1</sup> Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Paramadina: Jakarta, 1995), h.328

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Medemisme hingga Past-Modernisme, (Jakarta: Paramadina, 1996), Cet. ke-1, h.1

<sup>3</sup> Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 2011) h. 1

<sup>4</sup> Harun Nasution, Islam Ditinjau..., h.1

<sup>5</sup> D. Hendro Puspito O.C, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) h. 34

<sup>6</sup> Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2002) h. 129

<sup>7</sup> Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, h. 13.

terhadap sikap dan perilaku.<sup>8</sup> setiap orang akan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang diyakini. Muhammad Iqbal nampaknya hendak menekankan bahwa agama mestinya diaktualisasikan dalam kehidupan.

Masalah kenegaraan dalam Islam selalu menjadi agenda politik yang ramai dibicarakan umat Islam, karena di samping relevansinya dengan agama juga membawa pengaruh dalam kehidupan bernegara. Sebab itu banyak tokoh pemikir politik Islam tertarik terhadap masalah pemikiran kenegaraan ini, baik yang hidup pada zaman klasik, pertengahan maupun Modern.<sup>9</sup>

Pemikiran kenegaraan yang dikemukakan para pemikir politik Islam dipengaruhi secara kuat oleh kenyataan historis dan kondisi sosio-politik pada masanya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh H.A.R Gibb bahwa pemikiran itu merupakan rasionalisasi terhadap sejarah masyarakat dan presedan-presedan yang diartikan oleh ijmak.<sup>10</sup>

Politik dalam bahasa Arab disebut "siasyah" sedangkan dalam bahasa Inggris "politics". Politik artinya cerdas dan bijaksana. Memang dalam pembicaraan sehari-hari kita mengartikan suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi sebenarnya para ahli ilmu politik mengakui bahwa sangat sulit dalam memberikan definisi ilmu politik.<sup>11</sup>

Ketiga kelompok pemikir Islam mempunyai pendapat sendiri-sendiri mengenai system politik islam kelompok pertama, mempunyai pandangan bahwa politik dan islam adalah menyatu dan tak terpisahkan. Dalam pandangan kelompok ini politik merupakan system terciptanya Negara tidak dapat dipisahkan dari Agama (Islam), karena tugas Negara adalah menegakkan peraturan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, dan Sunnah. Syariat Islam harus dipraktikkan yang merupakan hokum dalam Negara bagi seluruh umat Islam. Kelompok ini diwakili oleh Muhammad Rasid Ridho, Hasan Al-Binnad, Abu Al-A'la al-Maududi,

Sayyid Qutub, Imam Khomaini, dan di Indonesia ada M. Natsir.<sup>12</sup>

Kelompok kedua memiliki pandangan bahwa Agama dengan politik melakukan simbiosis yang merupakan adanya hubungan timbale balik yang saling membutuhkan. Agama (Islam) membutuhkan Negara dan system politik sebagai wadah untuk menegakkan aturan-aturan syariat Islam sementara Negara membutuhkan Agama sebagai bentuk legitimasi. Kelompok ini diwakili oleh Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Muhammad Husain Haikal, Fazrul Rahman, dan di Indonesia ada Abdurrahman Wahid.<sup>13</sup>

Kelompok ketiga ini memiliki pandangan sekuler, yaitu pandangan bahwa Agama harus dipisahkan dengan Negara dengan argument Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan untuk mendirikan Negara. Terbentuknya Negara dalam masa awal islam merupakan factor alamiah dan histories dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak perlu mendirikan Negara Islam atau Khalifah Islamiyah. Agama merupakan hubungan individu dengan Allah sedangkan Negara merupakan hubungan antar sesama manusia. Kelompok ini diwakili oleh Ali bin al-Raziq, thaha Husain, Mustafa kemal attaruk, di Indonesia ada Sukarno.<sup>14</sup>

Dalam sejarah Islam, konsep kenegaraan yang dirumuskan oleh para ulama paling tidak ada dua maksud, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Din Syamsuddin. Pertama, untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara (baik secara teoritis maupun secara formalis), artinya sebuah upaya untuk menjawab bagaimana bentuk Negara dalam Islam. Hal ini diasumsikan bahwa suatu hal yang mustahil dalam ajaran Islam yang sempurna tidak menyinggung masalah kenegaraan. Padahal masalah itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Kedua, untuk mengupayakan idealisasi dari Islam terhadap proses penyelenggaraan Negara (baik pencarian substansial kenegaraan atau segi praktis bernegara). Proses penyelenggaraan ini berupaya menjabarkan bagaimana isi Negara menurut Islam. Karena menurut pendekatan yang kedua ini didasarkan pada asumsi bahwa

<sup>8</sup> Mustofa Anshori, *Agama dan Aktualisasi diri*, (Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2005), h. 26-27

<sup>9</sup> Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A. Hasjmy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.1

<sup>10</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh, Disadur dari Ann K.s Lambton, state and Government in Medieval Islam*, (London: Oxford University Press, 1981), h. XIII. H. Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A. Hasjmy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 1

<sup>11</sup> Inu Kencana. *Al-Quran dan ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h.74

<sup>12</sup> Munawir Djadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 39-40

<sup>13</sup> Munawir Djadzali. *Islam dan Tata Negara*, h. 41

<sup>14</sup> Munawir Djadzali. *Islam dan tata Negara*, h. 41-42

Islam tidak membawa konsep tertentu tentang Negara, tapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral.<sup>15</sup>

Kedua pendekatan di atas kalau kita perhatikan secara teoritik terlihat berbeda. Akan tetapi bila dilihat dari tujuannya, maka mempunyai kesamaan yaitu adanya upaya menemukan titik temu antara idealitas agama dan realitas politik.

Sehingga dari kesenjangan inilah memunculkan gerakan-gerakan seperti ISIS (Islamic State Irak and Suriah) yang ingin mendirikan Khilafah atau Daulah Islamiyah yang banyak memunculkan penolakan di kalangan masyarakat dan terkhusus Negara-Negara Barat.

Diskusi suatu teori negara Islam di Indonesia adalah fenomena baru-baru ini saja, dan itu hampir seluruhnya dilakukan oleh penulis-penulis dan politisi modernis muslim, dari dunia pesantren sulit diperoleh suatu karya yang berarti tentang masalah ini tetapi, sekalipun kelompok modernis telah banyak berbicara tentang sebuah Negara berdasarkan Islam pada periode pasca kemerdekaan, namun sayangnya belum seorang pun di antara mereka yang berhasil menyusun suatu karya sistimatis dan ilmiah, yang mampu mengartikulasikan hakekat dan corak suatu negara Islam yang ingin mereka ciptakan di Indonesia. Fenomena tentang langkanya karya mendasar ini sebenarnya bukan saja dirasakan di Indonesia di negari-negeri Islam yang lain pun sulit sekali ditemukan suatu karya yang mengkaji secara teoritis, hakekat, watak dan sifat suatu negara yang berdasarkan Islam.<sup>16</sup>

Sayyid Qutub, sistim politik adalah hal memikirkan tentang persoalan-persoalan mengurus pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap penguasa alam merealisasikan hukum Islam untuk kemudian dipatuhi oleh semua pihak.<sup>17</sup>

Beliau menegaskan Islam adalah Agama yang universal yang meliputi unsur kehidupan. Seorang muslim tidak akan sempurna agamanya kecuali jika ia menjadi politikus, karena Nabi

Muhamad merupakan seorang politikus ulung yang dapat menyatukan semua unsur di Madinah dalam sebuah Negara Madinah dalam sebuah Negara Madinah dengan membentuk piagam Madinah dan dipatuhi oleh semua kalangan. Memiliki pandangan jauh tentang problematika umatnya, memperhatikan urusan-urusan di dunia dan bersedia untuk membantu mencari jalan demi kepentingan umat bersama. Tidak ada kebaikan dalam Agama (Islam) yang tidak ada politiknya dan tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak ada agamanya. Islam datang dengan membawa ajaran politik untuk membahagiakan umatnya di dunia maupun di akhirat. Dengan umat memiliki sistim politik dan mengaturnya, maka akan memperoleh kebahagiaan dalam lingkungan mereka sendiri.<sup>18</sup>

Sayyid Qutub mengatakan Islam itu Agama yang lengkap, tidak hanya di atur tuntunan moral dan peribadatan tetapi terdapat juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh sebab itu, untuk memperoleh kejayaan dan kemakmuran umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya.

Dengan menyatakan hal di atas, menurut beliau dalam sistem politik Islam terdapat tiga pokok yang harus dipenuhi. Pertama Pemerintahan supra Nasional/ bahwasanya wilayah negara meliputi seluruh dunia Islam dengan sentralisasi kekuasaan pada pemerintahan pusat yang dikelola atas prinsip persamaan. Beliau menilai pemerintahan Islam bercorak manusiawi, terutama dengan konsepsinya yang kuat tentang kesatuan manusia serta tujuannya yang menghendaki agar seluruh umat manusia terhimpun di bawah bendera persaudaraan dan persamaan.<sup>19</sup>

Kedua, persamaan hak antara para pemeluk berbagai agama, Negara Islam menjamin bahwa hak-hak bagai Agama lain dalam persaudaraan apabila dalam hal persoalan kebutuhan hidup manusia pada umumnya. Ketiga, terdapat tiga asas politik pemerintah Islam. Ketiga asas tersebut adalah keadilan penguasa, dalam Negara Islam setiap individu menikmati keadilan yang sama tanpa ada diskriminasi. Ketaatan

<sup>15</sup> Jeje A. Rojak. Politik Kenegaraan.,(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), h.2

<sup>16</sup> Ahmad Syafii Maarif Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia), h. 125

<sup>17</sup> Antoni Black, Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga kini, (Jakarta:Serambi Ilmu ilmu Semesta, 2001), h. 98

<sup>18</sup> Muhammad Abdul Kadir Abu Faris, Fiqh Politik Hsan Al-Banna, (Surabaya: Media Insani, 2011), h.40

<sup>19</sup> Munawir Djadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press.1990), h. 149

rakyat, menurutnya ketaatan ini merupakan perpanjangan dari kewajiban taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, sebab taat kepada pemegang kekuasaan itu bukan karena jabatannya, tetapi mereka merupakan perpanjangan tangan dalam menegakkan syariat Islam. Terakhir tentang musyawarah antara penguasa dan rakyat. Permusyawaratan merupakan salah satu dari prinsip-prinsip pemerintahan Islam sedangkan teknik pelaksanaannya tidak secara khusus ditetapkan. Dengan demikian, menurutnya bentuk penyelenggaraannya disesuaikan kepada kepentingan dan kebutuhan.<sup>20</sup>

Adanya berbagai aliran dan golongan yang ada dalam sejarah adalah merupakan fakta, walau hal ini terkadang menyulitkan, ketika kita harus menentukan tentang pendapat mana yang di ikuti. Secara hakiki, sejarah pemikiran politik Islam sejak awal pertumbuhannya, termasuk di bidang politik adalah sejarah Islam mazhab, para zaman modern ketika umat Islam dihadapkan pada tantangan kolonialisme dan modernisme dalam segala aspek dan seginya, masalah aliran pemikiran Islam menjadi semakin Rumit. Sikap yang dapat diambil dalam keadaan demikian adalah kita memandang bahwa semua aliran tersebut adalah Islam dan tidak keluar darinya.<sup>21</sup>

Sehubungan dengan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemikiran Sayyid Qutub yang menitik beratkan pada konsep agama dan konsep negara dan bagaimana hubungan antara keduanya. Maka permasalahannya adalah bagaimana pemikiran Sayyid Qutub tentang agama sebagai dasar negara? dan bagaimana pemikiran Sayyid Qutub tentang hubungan agama dengan negara?

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menggunakan literature (kepustakaan) sebagai bahan dan penelitian, dan kajian disajikan secara deskriptif dan analisis, yakni analitis dalam hubungan Agama dan Negara perspektif Sayyid Qutub. Data- data yang menyangkut pemikiran, metodologi pemikiran Sayyid Qutub ditelusuri dari pemikirannya sendiri sebagai sumber primer

maupun pendapat dari tokoh yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

Langkah-langkah penelitian ini, peneliti mencari bahan berupa buku rujukan yang bersangkutan dengan pokok permasalahan penelitian, kemudian penulis memahaminya dengan pemikiran Sayyid Qutub sebagai objek penelitian. Namun tidak hanya menggunakan rujukan berupa buku Asli, peneliti juga menggunakan rujukan lain misalnya, media cetak, internet, jurnal ilmiah atau sumber-sumber lain .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Kualitatif Deskriptif”, yaitu suatu metode dalam metode suatu objek, baik berupa nilai-nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya.<sup>22</sup> Metode deskriptif ini diterapkan sejak persiapan penelitian, pelaksanaan pengumpulan data serta analisis data.<sup>23</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Analisis Historis”, yaitu pendekatan yang mengutamakan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitiannya dapat betul- betul berkualitas, data yang di kumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

### a) Data Primer

Literatur yang merupakan karya Sayyid Qutub ataupun karya yang membahas tentang pemikiran Sayyid Qutub, seperti pemikiran Sayyid Qutub yang di tulis Muhammad Sayyid al-wakil, yang berjudul Pergerakan Islam Terbesar Abat ke 14 H (2001) membahas secara luas pemikiran Sayyid Qutub dalam bidang pemerintahan di Mesir, dan Sayyid Qutub banyak melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang bersumber dari Alquran dan Sunah. Salim Bahsanawi (butir-butir) pemikiran Sayyid Qutub yang berjudul, Petunjuk Jalan dalam Ajaran Islam. Mahdi Fadulullah (1991) yang berjudul Titik Temu Agama dan Politik (Analisis Pemikiran Sayyid Qutub), yang membahas tentang keadaan politik yang ada di mesir. beserta buku tambahan lainnya.

### b) Data Sekunder. Buku yang mendukung

<sup>20</sup> Munawir Djadzali. Islam dan tata Negara, h. 150-151

<sup>21</sup> Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2011) h. 323-324

<sup>22</sup> Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma. 2005) h. 58

<sup>23</sup> Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat, h. 250

penelitian seperti Khazanah Intelektual Islam, Kebijakan Politik Nabi saw, Islam dan Tata Negara, Teori Politik Islam, beserta buku tambahan lainnya.

Menurut Patton, analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Setelah dianalisis kemudian memahami, menafsirkan dan interpretasi data. Prosedur ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan arti serta pemaknaan secara signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi makna yang diuraikan.<sup>24</sup>

Adapun Langkah-langkah yang ditempuh adalah menggunakan unsur-unsur metode Analisis. Langkah-langkah dalam menerapkan metode analisis, berturut-turut reduksi data, klasifikasi data, display data dan melakukan penafsiran dan interpretasi serta mengambil kesimpulan.

### Riwayat Hidup Sayyid Quthb

Sayyid Quthb lahir di sebuah desa di dataran tinggi Mesir pada tahun 1906. Dia adalah putra seorang petani yang cukup makmur. Pendidikan dasarnya mencakup sekolah al-Qur'an tradisional. Dia telah hafal Al-Qur'an pada usia sepuluh tahun, kandati masih remaja, ia pindah ke Kairo dan menyelesaikan pendidikan di Dar al-Ulum.<sup>25</sup>

Beliau mempunyai dua saudara perempuan dan seorang adik laki-laki. Mereka itu adalah Hamidah, Aminah dan Muhammad, Ayahnya meninggal ketika ia di Kairo, maka dia bersama ibunya mewarisi beban tanggung jawab yang berat, yaitu menanggung dua orang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki, dan ia menganjurkan ibunya untuk pindah ke Kairo. Lalu pada tahun 1940 ibunya wafat.<sup>26</sup>

Sayyid Quthb adalah seorang yang jenius. Tanda-tanda kejeniusan beliau sudah nampak sejak awal, bahkan tulisan beliau dimuat di surat kabar al-Ahram saat masih menjadi mahasiswa di Dar al-Ulum. Padahal tulisan yang dimuat di surat

kabar al-Ahram pada saat itu hanya terbatas di kalangan sastrawan dan pemikir kaliber Nasional Mesir. Kendatipun masih sangat muda, beliau telah ikut berpartisipasi bersama para sastrawan besar dan pemikir ulung, beliau menandingi mereka dalam penulisan karya ilmiah dan sastra di surat terbesar tersebut.<sup>27</sup>

Pada tahun 1352 H/1933 M, Sayyid Quthb lulus dari Dar Al-Ulum dan meraih gelar sarjana dalam bidang sastra dan diploma dalam bidang pendidikan. Setelah itu beliau sibuk menjalankan berbagai tugas dan jabatan. Pada masa-masa ini beliau telah mulai menulis buku-buku sastra dan penulisan makalah seperti di majalah Al-Muqatatha dengan judul deskripsi seni dalam Al-Qur'an pada tahun 1939 M.<sup>28</sup>

Setelah tamat dari Dar Al-Ulum Sayyid Quthb diangkat menjadi penulis di kementerian pendidikan dan pengajaran tapi pindah tugas ke sekretaris sampai selesai. Pada periode ini, ia mengkaji ilmu pengetahuan di berbagai bidang seperti sejarah, geografi, sastra arab, bahasa Inggris, ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu pasti, fisika dan agama.<sup>29</sup>

Pada tahun 1944 M, buku beliau yang berjudul Al-Tashwir al-Fanni fi al-Qur'an diterbitkan, lalu pada tahun 1945 M, buku-buku beliau merajai pasaran dan menjadi best seller seperti buku Al-Madinah Al-Mashurah (kota yang tersihir) Thiflun min al-Qoryah (anak dari desa), dan Kutub Wa Syahsiyah (buku dan toko). Lalu bersama dengan beberapa saudaranya beliau menuliskan buku Al-Athyaf Al-Arba'ah (empat impian)<sup>30</sup>

Pada tanggal 7 oktober 1946 ia menerbitkan makalah yang berjudul Dirasatu al-Kitabah sebagai realisasi permulaan pemikiran tentang idiologi Islam. Ia mengkritik dengan tajam nilai-nilai sosial di Mesir, baik segi sosial politik, maupun mental. Ia mengajak umat Islam untuk meningkatkan pembangunan secara utuh, ia mengatakan bahwa al-Qur'an menganjurkan hal itu tersebut dalam ayat yang berbunyi "hendaklah sebagian di antara kamu menjadi umat penyuruh berbuat kebaikan dan pencegah kemunkaran dan mereka itulah

<sup>24</sup> Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, h. 68

<sup>25</sup> L. Carl Brown, wajah Islam Politik Politik Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat, ( Jakarta: Serambi,2003), h.223

<sup>26</sup> Mahdi Fahulullah, Titik Temu Agama dan Politik (Solo: V. Ramadhani:1991), h. 29

<sup>27</sup> Muhammad Sayyid al-Wakil. Pergerakan Islam Terbesar abad ke 14 H Studi Analis terhadap Manhaj Gerakan Ikhwanul Muslimin, (Bandung, as-Syamil, Pres dan Grafika,2001) h.220

<sup>28</sup> Muhammad Sayyid al-Wakil. Pergerakan Islam..., h.221

<sup>29</sup> Mahdi Fahulullah, Titik Temu...h. 30-31

<sup>30</sup> Muhammad Sayyid al-Wakil. Pergerakan Islam..., h. 221

orang-orang yang beruntung".<sup>31</sup>

Pada tahun 1948 M beliau menulis buku *Al-Naqda al-Adabi Ushuluh Wa Manahij* (kritik sastra, perinsip dan metodologinya) dan buku *Masyahidu al-Quyamah Fi al-Quran* (pemandangan Kamat dalam al-Quran). Setelah itu beliau menuliskan banyak buku dengan banyak orientasi sebagaimana beliau juga menuliskan kumpulan syair dan puisi. Pada tahun yang sama beliau menerbitkan majalah *Al-Fikr al-Jadid*, dan beliau pergi ke Amerika untuk melanjutkan studi. Setelah meraih gelar Magister beliau kembali lagi ke Mesir, lalu beliau menulis buku *Amerika allati raaitu* (Amerika yang saya lihat)<sup>32</sup>

Sejak tahun 1948 M beliau telah dikenal oleh kaum muslimin sebagai salah seorang pemikir muslim yang tiada tanding kejeniusannya dalam mengungkap keindahan-keindahan hukum islam yang setelah lama tertimbun oleh reruntuhan syubhat yang disebarikan oleh musuh-musuh Islam yang bertujuan menggelincirkan esensi-esensinya dan memadamkan cahayanya. Lalu beliau menulis buku-bukunya seperti *marakatu Al Islam Wa Al Samaliyah* (perang antara Islam dengan kapitalisme), *Dirasat Islamiyah* (beberapa studi Islam).<sup>33</sup>

Pada akhir tahun 1948 muncul buku karangannya yang berjudul *al-Adalah al-Ijtimaiyah fi Al-Islam* yang menegaskan bahwa keadilan sosial yang benar yang menjadi cita-cita manusia tidak mungkin terwujud kecuali harus dengan Islam. Maka perlu kita memiliki sastra yang tumbuh (memancar) dari pandangan Islam.<sup>34</sup> Pada tahun 1950 M, beliau memulai penulisan *Fi Zhilal al-Quran*.

Mulai tahun 1951 hingga 1956 Sayyid Quthb mencapai puncak ketinggian sastranya dan ikut serta dalam kelompok *Al-Ikhwan al-Muslim* sebagai ahli pikir dalam partai yang ide-idenya sangat dihargai kendatipun ia belum menjabat sebagai pemimpin, karena ia harus menjadi anggota dalam waktu yang lama. Ia mengajak mereka agar kembali menuju ideologi Islam seperti dimuat dalam surat kabar *Al-Ikhwan al-Muslimun*, yang mana pada tahun 1954 pemimpin redaksi dipecat. Sesudah itu sayyid

Quthb mengarang buku-buku yang berkenaan dengan ideologi Islam seperti *Al-Islam Wa al-Adalah al-Islamiyah Hadza al-Din Khasa-is al-Nadhariyah al-Islamiyah Ma'alim bi al-Thariqat* dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Pada tanggal 27 oktober 1954, Sayyid Quthb dituduh berusaha untuk menggulingkan presiden Gamal Abdul Naser, sehingga ia ditangkap dan dipenjarakan bersama- kawan-kawannya selama 15 tahun dengan dipekerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar. Tetapi kalau beliau hanya menjalani hukuman selama 10 tahun.<sup>36</sup>

Sayyid Quthb keluar dari tahanan tahun 1964 dan pada tahun 1965 M karangannya yang berjudul *Ma'alimun bi -Tharit terbit* dan ia ditangkap untuk kedua kalinya bersama-sama kawan-kawannya dari *Al-Ikhwan al-Muslim* dengan tuduhan bahwa ia mengkoordinir komplotan untuk menggulingkan sistem pemerintahan.<sup>37</sup> Ketika ditangkap pada tahun 1965 M, Sayyid Quthb sudah berumur lebih dari 60 tahun dan sedang mengidap penyakit jantung ginjal dan radang usus. Namun kondisi beliau yang mengenaskan sama sekali tidak menjadikan beliau mendapat keringanan dari para thaghut, baik karena penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut. Bahkan mereka memanfaatkan peluang sakit beliau sebagai sarana untuk memperberat dan meningkatkan tekanan agar beliau mau mengikuti semua yang ingin mereka tuduhkan.<sup>38</sup>

Karena berbagai tuduhan yang dikenakan kepada Sayyid Quthb, maka pada tanggal 22 Agustus 1966 beliau dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah agung (Pengadilan Negeri) di Kairo. Akibat dari hukuman itu timbul aksi protes yang diorganisir oleh organisasi *Jamaat Islami*, dilaksanakan pula oleh 4 partai di Pakistan yang terdiri atas *Majelis Nidlam al-Islam*, *Universitas Islam*, *Universitas Alami*, *Organisasi Britania Jamaat Islam*, begitu pula yang dipimpin oleh Fathi yakni sekjen *Jamaat Islam* di Libanon.

kemudian *Majelis Al-Ummah Tunis*, *Mufti Mufti Republik Tunis*, putra Mahkota Yordan, *Jum'iyah Ta'sisiyah Sudan* Sayyid Hal al-Fasi pemimpin partai kemerdekaan di Maghrib, syaikh Ahmad al-Zuhawi, pemimpin *Rabithatul Ulama*

<sup>31</sup> Mahdi Fahulullah, *Titik Temu Agama...*, h. 34

<sup>32</sup> Muhammd Sayyid al-Wakil. *Pergerakan Islam...*, h.122

<sup>33</sup> Muhammd Sayyid al-Wakil. *Pergerakan Islam...*, h.224

<sup>34</sup> Mahdi Fahulullah, *Titik Temu...*, h. 34

<sup>35</sup> Mahdi Fahulullah, *Titik Temu...*, h. 35

<sup>36</sup> Mahdi Fahulullah, *Titik Temu...*, h. 35

<sup>37</sup> Mahdi Fahulullah, *Titik Temu...*, h. 36

<sup>38</sup> Muhammd Sayyid al-Wakil. *Pergerakan Islam...*, h.245

Di Irak dan tiga orang pembesar pemuka agama lainnya semuanya mengajak presiden Gamal Abdul Naser agar undang-undang hokum mati ditinjau kembali.<sup>39</sup> Pada tanggal 29 Agustus M secara mendadak dan tanpa pengumuman serta prosedur yang semestinya, eksekusi dilaksanakan di pagi hari terhadap tiga orang syuhada, Sayyid Quthb, Muhammad Hawwasy, dan Abdul Fatah Ismail.<sup>40</sup>

## Penutup

Dari hasil penelitian tentang “Hubungan Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Politik Sayyid Qutub” yang telah dipaparkan, maka pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan pemikiran politik sayyid qutub yang terangkum dalam dua sub bab, sebagaimana dalam pokok permasalahan.

1. Agama sebagai Dasar Negara. Sedangkan menurut Sayyid Quthb, agama harus menjadi dasar bagi terbentuknya pemerintahan. Bagi Sayyid Quthb, untuk memperoleh predikat Islam, sebuah masyarakat atau negara harus dijalankan atas peraturan, hukum dan undang-undang Tuhan. jika tidak demikian, maka negara tersebut akan digolongkan sebagai negara jahili, karena secara tidak langsung berupaya memisahkan kekuasaan Allah yang hakiki. Selanjutnya, dalam hal ini Sayyid Quthb menyebut tiga aspek yang dapat digolongkan sebagai azas-azas pemerintahan Islam, yaitu keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat.
2. Sedangkan Sayyid Quthb justru menganjurkan dinafasnya atau diwarnainya sebuah kekuasaan politik dengan agama. Antara Agama dan negara memiliki hubungan yang saling terkait. Sayyid Quthb berangkat dari paradigma kesempurnaan ajaran Islam. Islam dipandang sebagai pedoman dan panduan yang padu untuk segala aspek kehidupan umat manusia di setiap waktu dan tempat.

## Pustaka Acuan

- Anshori, Mustofa, Agama dan Aktualisasi Diri, Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2005.
- Azra, Azyumardi, Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Medernisme hingga Past-Modernisme, Jakarata: Paramadina,1996, Cet. ke-1.
- Black, Antoni, Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga kini, Jakarta: Serambi Ilmu ilmu Semesta, 2001.
- Brown, L. Carl, Wajah Islam Politik Politik Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat, Jakarta: Serambi, 2003.
- Fahulullah, Mahdi, Titik Temu Agama dan Politik, Solo: V. Ramadhani: 1991.
- Faris, Muhammad Abdul Kadir Abu, Fiqh Politik Hasan Al-Banna, Surabaya: Media Insani, 2011.
- Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Yogyakarta: Paradigma, 2005. Kahmad, Dadang, Sosiologi Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kencana, Inu, Al-Quran dan ilmu Politik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Maarif. Ahmad Syafii, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Madjid, Nurcholis, Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina:Jakarata, 1995.
- Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: UI Press,2011.
- Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Pulungan, J. Suyuti, Fiqih, Disadur dari Ann K.s Lambton, State and Government in Medieval Islam, London: Oxford University Pres,1981.
- Puspito O.C, D. Hendro, Sosiologi Agama, Yogyakarta:Kanisius,1998.
- Rojak, Jeje A., Politik Kenegaraan, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Sirajuddin, Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A. Hasjmy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press.1990.
- Wakil, Muhammd Sayyid al-, Pergerakan Islam Terbesar abad ke 14 H Studi Analis terhadap Manhaj Gerakan Ikhwanul Muslimin, Bandung: as-Syamil Press dan Grafika, 2001.

<sup>39</sup> Mahdi Fahulullah, Titik Temu Agama..., h.36

<sup>40</sup> Muhammd Sayyid al-Wakil. Pergerakan Islam Terbesar..., h. 248

